

Pendahuluan

Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan salah satu momen paling penting di tingkat nasional dimana seluruh rakyat terlibat. Kandidat yang berpartisipasi dalam pilpres tidak bisa lepas dari citra dan dukungan partai-partai yang menjadi kesadaran politik mereka. Biasanya, partai atau koalisi partai mendukung satu pasangan calon Presiden dan wakil Presiden. Partai tidak hanya sebagai wadah untuk menyampaikan pandangan politik tetapi juga sebagai penjaga respon terhadap aspirasi anggota dan masyarakat. Keterbukaan dan kinerja yang baik dari sebuah partai bisa membuat disenangi masyarakat, bahkan membuat mereka menjadi pemilih setia. Namun, sejarah dan citra buruk suatu partai juga bisa berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat. Pengaruh citra partai ini juga berdampak pada calon yang diusung dalam pemilihan, karena citra partai sering kali menjadi cerminan bagi calon yang diusungnya (Yossimeilinda, 2021).

Pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari suara dan aspirasi masyarakat. Aspirasi ini mencerminkan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, yang merupakan kunci keberhasilan pemilu. Preferensi

politik, yaitu pilihan individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan dan aktivitas sehari-hari, juga memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilu. Ini tercermin dalam nilai-nilai, ideologi, agama, dan budaya yang memengaruhi preferensi politik seseorang.

Faktor dari Status Sosial Ekonomi (SSE) terdapat peran yang signifikan dalam memengaruhi preferensi politik masyarakat. Dalam konteks keragaman status sosial ekonomi, yang dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan jenis tempat tinggal serta interaksi sosial dan lingkungan memainkan peran krusial. Manusia sebagai makhluk sosial tak dapat menghindari pengaruh ini. Dalam politik, individu dengan status ekonomi tinggi cenderung merasa memiliki efektivitas dan kompetensi politik yang lebih besar. Mereka yang merasa demikian lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Faktor pendidikan memainkan peran penting di sini, di mana individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Sebaliknya, individu dengan tingkat status ekonomi rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih rendah (Sastroatmodjo, 1995).

Langkat mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih. Data tentang tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Langkat dalam pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diperoleh dari pengolahan data tahun 2018 yang terdokumentasi pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Persentase Partisipasi Masyarakat Kabupaten Langkat

No	Pemilihan Legislative		Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
	2009	2014	2009	2014	2013
1.	64%	62%	66%	66%	60%

Sumber : Data KPU Kabupaten Langkat 2018

Berdasarkan informasi dalam tabel, dapat dilihat bahwa persentase partisipasi pemilih di Kabupaten Langkat hanya berkisar antara 60% hingga 66%. Hal ini dianggap rendah karena belum memenuhi target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI, yaitu 77,5% (Sumber: kompas.com Tahun 2017).

Berdasarkan hasil dilapangan dimana yang mempengaruhi dari tingkat status sosial ekonomi dan pendidikan

yang rendah karena putus sekolah dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada pemahaman pemilih pemula tentang pemilu, termasuk Pilpres 2024 di Desa Suka Mulia, Kabupaten Langkat. Kurangnya pemahaman pemilu pada pemilih pemula dapat juga dipengaruhi oleh faktor tingkat status sosial ekonomi. Pertama-tama, pemilih pemula dari lapisan masyarakat tingkat status sosial ekonomi rendah mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan politik. Pendidikan yang lebih rendah dapat menghambat kemampuan mereka untuk memahami kompleksitas sistem politik dan proses pemilu (Sholikin, 2021a).

Selanjutnya, aspek ekonomi juga dapat menjadi hambatan. Pemuda dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin lebih fokus pada mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mengikuti perkembangan politik atau memahami isu-isu pemilu. Ketidaksetaraan dalam akses informasi juga dapat terjadi. Pemilih pemula dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap media, internet, atau literatur politik yang dapat meningkatkan pemahaman mereka

kehidupan bermasyarakat, pekerjaan bahkan pendidikan. Menurut Polak Abdulsyani (2007) status (kedudukan) memiliki dua aspek, aspek yang pertama yaitu aspek struktural. Aspek struktural ini bersifat hierarkis yang artinya aspek ini secara relatif mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya terhadap status-status lain. Sedangkan aspek status yang kedua yaitu aspek fungsional atau peranan sosial yang berkaitan dengan status-status yang dimiliki seseorang dalam sebuah kelompok sosial. Makin tinggi kedudukan seseorang maka makin mudah pula dalam memperoleh fasilitas yang diperlukan dan diinginkan. Peranan adalah konsekuensi atau akibat kedudukan atau status sosial ekonomi seseorang. Tetapi cara seseorang membawakan peranannya tergantung pada kepribadian dari setiap individu, karena individu satu dengan yang lain berbeda (Nasution, 1994).

Sedangkan FS. Chapin Kaare (1989) mengungkapkan status sosial ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Selain

ditentukan oleh kepemilikan materi, status sosial ekonomi seseorang dapat didasarkan pada beberapa unsur kepentingan manusia dalam kehidupannya, status dalam kehidupan masyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam kekerabatan, status jabatan, dan status agama yang dianut. Status sosial merupakan keadaan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial. Proses sosial terjadi karena adanya interaksi sosial. Menurut Abdulsyani (2002), interaksi sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang dengan kelompok-kelompok manusia. Sedangkan kondisi ekonomi adalah keadaan atau kenyataan yang terlihat atau dirasakan oleh indera manusia tentang keadaan orang tua dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi permasalahan ekonomi yang dihadapi orang tua atau keluarga yang utama adalah usaha atau upaya orang tua atau keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga mencapai kemakmuran.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah kondisi atau kedudukan

Pekerjaan menentukan status sosial ekonomi karena memungkinkan pemenuhan segala kebutuhan. Pekerjaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan upaya manusia untuk mencapai kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah dalam bentuk barang dan jasa, yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang mempengaruhi kemampuan ekonominya, sehingga bekerja atau berusaha menjadi keharusan bagi setiap individu. Ini karena pekerjaan memberikan dua aspek penting yaitu kepuasan fisik dan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam kaitan ini Suroto (1986) memberikan definisi mengenai pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak. Soeroto (1986) menjelaskan bahwa dengan bekerja orang akan memperoleh pendapatan, dari pendapatan yang diterima orang tersebut diberikan kepadanya dan keluarganya untuk mengkonsumsi barang dan jasa hasil pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas, barang siapa yang mempunyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi secara nyata dan aktif dalam pembangunan. Dari sudut pandang sosial, tujuan bekerja

tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi atau mendapatkan penghasilan untuk keluarga. Selain itu, orang yang bekerja juga berusaha mendapatkan status, diterima sebagai bagian dari unit status sosial ekonomi tertentu, dan memainkan peran dalam status tersebut Kartono (1991). Jadi untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut:

- Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, pemimpin ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha.
- Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualan dan jasa.
- Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat angkut atau bengkel.

Tingkat pekerjaan orang tua yang berstatus tinggi sampai rendah tampak pada jenis pekerjaan orang tua, yaitu sebagai berikut:

- Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi tinggi, PNS golongan IV ke atas, pedagang besar, pengusaha besar, dokter.
- Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi sedang

adalah pensiunan PNS golongan IV A ke atas, pedagang menengah, PNS golongan III/b-III/d, guru SMP /SMA, TNI, kepala sekolah, pensiunan PNS golongan II/d-III/b, PNS golongan II/d-III/b, guru SD, usaha toko.

- Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi rendah adalah tukang bangunan, petani kecil, buruh tani, sopir angkutan, dan pekerjaan lain yang tidak tentu dalam mendapatkan penghasilan tiap bulannya (Lilik, 2007).

Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, diharapkan individu dapat terbuka terhadap berbagai inovasi seperti teknologi, materi baru, sistem, dan ide-ide segar. Pendidikan juga mengajarkan cara berpikir ilmiah. Ngadiyono (1998) membedakan pendidikan berdasarkan isi program dan penyelenggaraannya menjadi tiga macam, yaitu:

- Pendidikan formal merupakan pendidikan resmi di sekolah-sekolah, penyelenggaraannya teratur dengan penjenjangan yang tegas, persyaratan tegas, disertai peraturan yang ketat, pendidikan

ini didasarkan pada peraturan yang tegas.

- Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh melalui hasil pengalaman, baik yang diterima dalam keluarga maupun masyarakat. Penjenjangan dan penyelenggaraannya tidak ada, sistemnya tidak diformulasikan.
- Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, penyelenggaraannya teratur. Isi pendidikannya tidak seluar pendidikan formal, begitu juga dengan peraturannya.
- Pendidikan biasanya dikelompokkan mulai dari tamat SD/ sederajat, tamat SMP/ sederajat, tamat SMA/ sederajat, hingga tamat D3- Sarjana. Dengan pendidikan, seseorang diharapkan dapat meningkatkan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan sehingga lebih baik dalam berinteraksi dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup (Abdullah, 1993).

Pendapatan

Badan Pusat Statistik (BPS) merinci pendapatan dalam kategori sebagai berikut:

Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan diterima biasanya sebagai balas atau kontra prestasi, sumbernya berasal dari:

- Gaji dan upah yang diterima dari gaji pokok, kerja sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang.
- Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, penjualan dari kerajinan rumah.

Hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah. Keuntungan serial yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik.

Pendapatan yang berupa barang yaitu: pembayaran upah dan gaji yang ditentukan dalam beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan kreasi. Berdasarkan penggolongannya BPS (Badan Pusat Statistik) membedakan pendapatan penduduk menjadi empat golongan, yaitu: 1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp 3.500.000 per bulan. 2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan antara Rp 2.500.000 s/d Rp 3.500.000 per bulan. 3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah antara Rp

1.500.000 s/d Rp 2.500.000 per bulan. 4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp 1.500.000 per bulan. .

Jenis Tempat Tinggal

Menurut Kaare Svalastoga dalam Sumardi (2004) untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari: (1) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa permanen, kayu, dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah ke bawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen. (2) Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempatinnya. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran dan kualitas rumah. Rumah yang ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan

wakilnya dalam pemilihan anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Fungsi Pemilihan Umum

Tujuan diselenggarakannya Pemilihan Umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Pamungkas, 2009).

Menurut Joko J. Prihatmoko (2005), menganggap bahwa pemilu memiliki tiga peran utama:

Fungsi keterwakilan (Representativeness).

Fungsi Integrasi, yaitu mempromosikan penerimaan antarpolitik dan partisipasi masyarakat.

Fungsi mayoritas yang besar untuk menjaga stabilitas pemerintah dan kemampuan untuk memerintah.

Menurut C.S.T Kansil (1986) berpendapat bahwa pemilu adalah alat demokrasi yang digunakan untuk:

Memperkuat dan mengembangkan fondasi demokrasi di Indonesia.

Mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Menjamin kesinambungan Orde Baru dengan menjaga Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pemilu dengan tujuan:

Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.

Menjamin konsistensi dalam peraturan pemilu.

Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam aturan pemilu.

Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Asas Pemilihan Umum

Menurut Fiqh Siyash (2016) Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Adapun yang dimaksud dengan asas "Luber dan Jurdil dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dengan apapun.

Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dandengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan terdapat dalam Pasal 2 yaitu: a. Mandiri. b. Jujur. c. Adil. d. Kepastian hukum. e. Tertib penyelenggara pemilu.f Keterbukaan. g.Proporsionalitas. h.Profesionalitas i. Akuntabilitas. J. Efisiensi dan k. Efektivitas.

Tinjauan Pemilih Pemula

Pengertian Pemilih Pemula

Azwar, 2008 (dalam Maulana, 2009) membagi pemilih di Indonesia menjadi tiga kategori. Pertama pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan

penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden (Fitra Endi Fernanda, 2016).

Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV pasal 198 pemilih Pemula adalah mereka yang baru pertama sekali untuk memilih dan telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau menikah yang mempunyai hak memilih.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

Terdaftar sebagai pemilih

Bukan anggota TNI/Polri

Tidak sedang dicabut hak pilihnya

Terdaftar di DPT

Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel X dan Variabel Y. Variabel X dalam penelitian ini adalah status sosial ekonomi, sedangkan variabel Y adalah pemahaman pemilu. Untuk mengetahui pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula, peneliti menyebarkan angket kepada 78 pemilih pemula berusia 17-21 tahun. Angket tersebut terdiri dari 20 pertanyaan untuk variabel X dan 20 pertanyaan untuk variabel Y. Untuk menentukan validitas angket yang dibagikan kepada responden, peneliti menggunakan rumus Pearson Product Moment. Selain itu, nilai r tabel dan r hitung juga digunakan untuk mengukur validitas.

Analisis Uji Validitas

13	0,222	0,750	Valid
14	0,222	0,723	Valid
15	0,222	0,672	Valid
16	0,222	0,710	Valid
17	0,222	0,690	Valid
18	0,222	0,761	Valid
19	0,222	0,689	Valid
20	0,222	0,775	Valid

Berdasarkan tabel 1.1 hasil uji Validitas status sosial ekonomi di atas dapat dilihat dari 20 angket pertanyaan yang disediakan oleh peneliti dan berdasarkan Uji data dari SPSS didapatkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 1.2 Hasil Uji Validitas Pemahaman Pemilu

No	r tabel	r hitung	Keterangan
1	0,222	0,648	Valid
2	0,222	0,744	Valid
3	0,222	0,729	Valid

4	0,222	0,678	Valid
5	0,222	0,778	Valid
6	0,222	0,695	Valid
7	0,222	0,651	Valid
8	0,222	0,672	Valid
9	0,222	0,767	Valid
10	0,222	0,755	Valid
11	0,222	0,612	Valid
12	0,222	0,672	Valid
13	0,222	0,738	Valid
14	0,222	0,747	Valid
15	0,222	0,766	Valid
16	0,222	0,765	Valid
17	0,222	0,760	Valid
18	0,222	0,579	Valid
19	0,222	0,667	Valid
20	0,222	0,725	Valid

Berdasarkan dari hasil uji Validitas pemahaman pemilu pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat dari 20 angket pertanyaan

yang disediakan oleh peneliti dan berdasarkan Uji data dari SPSS didapatkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid.

Analisis Uji Reabilitas

Analisis reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah alat ukur angket akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Reliabilitas dapat dihitung dalam penelitian ini menggunakan SPSS untuk mengetahui nilai reliabilitas dalam penelitian. Dimana penelitian ini menggunakan rumus uji Cronbach's Alpha. Adapun dasar pengambilan keputusan Analisis reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menurut Sugiyono (2017) antara lain :

Jika nilai koefisien reliabilitas > 0,6 maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik atau dengan kata lain instrumen adalah reliabel atau terpercaya.

Jika nilai koefisien reliabilitas < 0,6 maka instrumen yang diuji tersebut adalah tidak reliabel.

Berdasarkan pengolahan data dari SPSS peneliti memperoleh data dari uji Reliabilitas status sosial ekonomi dan pemahaman pemilu sebagai berikut :

Tabel 1.3 Hasil Uji Reliabilitas Status Sosial Ekonomi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.952	20

Berdasarkan tabel 1.3 hasil uji Reliabilitas status sosial ekonomi 0,952 diatas dinyatakan reliable karena Cronbach's Alpha > 0,6 maka dapat dikatakan bahwa angket termasuk reliable.

Tabel 1.4 Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Pemilu

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.947	20

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dari hasil uji Reliabilitas pengolahan data SPSS pemahaman pemilu 0,947 diatas dinyatakan reliable karena Cronbach's Alpha > 0,6 maka dapat dikatakan bahwa angket termasuk reliable.

Analisis Pearson Product Moment

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel sebagai titik pusat permasalahan yang dikaji yaitu variabel X status sosial ekonomi dan variabel Y pemahaman pemilu, untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut peneliti menggunakan rumus pearson product moment mencari keeratan hubungan kedua variabel. Nilai yang terdapat pada angket yang dibagikan

oleh peneliti terdapat bobot nilai yang berbeda di setiap item angket. Untuk melihat keeratan kedua variabel X dan Y berdasarkan dari olah data menggunakan rumus pearson product moment sebagai berikut :

Diketahui :

$$\sum X = 4773$$

$$(\sum X)^2 = 321729$$

$$\sum Y = 5742$$

$$(\sum Y)^2 = 443130$$

$$\sum xy = 362843$$

$$N = 78$$

Ditanya: Koefisien

Korelasi.....?

Rumus : $r =$

$$\frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

$$=$$

$$\frac{78 \cdot 362843 - (4773 \cdot 5742)}{\sqrt{(78 \cdot 321729 - (4773)^2) \times (78 \cdot 443130 - (5742)^2)}}$$

$$=$$

$$\frac{28.301.754 - 27.406.566}{\sqrt{(25.094.862 - 22.781.529) \times (34.564.140 - 32.970.564)}}$$

$$=$$

$$\frac{895.188}{\sqrt{(2.313.333) \times (1.593.576)}}$$

$$=$$

$$\frac{895.188}{\sqrt{3.686.471.948.808}}$$

$$= \frac{895.188}{1.920.018}$$

$$r = 0,46$$

Perhitungan koefisien korelasi diatas antara variabel X (status sosial ekonomi) terhadap variabel Y (Pemahaman Pemilu) dapat diketahui bahwa r hitung adalah sebesar 0,46. Korelasi dikategorikan pada korelasi sedang dilihat melalui perhitungan variabel X dan variebel Y menggunakan rumus korelasi pearson product moment.

Berikut tabel interpretasi korelasi menurut Sugiyono (2016) sebagai berikut :

Tabel 1.6 Interpretasi Angka Korelasi (nilai r)

Internal Koefesien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang

0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,1000	Sangat Kuat

Uji t Hipotesis

Menurut Yam & Taufik (2021) hipotesisi dalam penelitian kuantitatif terdiri atas dua yaitu hipotesis searah dan hipotesis dua arah. Hipotesis searah adalah adanya pengaruh positif maupun negatif antara variabel X dan variabel Y dalam arti hipotesisnya sudah jelas diantara positif maupun negatif. Hipotesis dua arah hipotesisnya belum jelas. Maka dari itu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis satu arah karena pengaruh status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilpres 2024. Berdasarkan adapun besarnya hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Diketahui :

$$r = 0,46$$

$$n = 78$$

Ditanya : t.....?

$$\begin{aligned} \text{Rumus} = t_{\text{hitung}} &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\ &= \frac{0,46 \sqrt{78-2}}{\sqrt{1-0,46^2}} \end{aligned}$$

$$= \frac{0,46 \sqrt{76}}{\sqrt{1-0,2116}}$$

$$= \frac{0,46 \cdot 8,7}{\sqrt{0,78}}$$

$$= \frac{4,00}{0,8}$$

$$t = 5,0$$

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis terhadap nilai t hitung sebesar 5,0 untuk mengetahui apakah Ha = adanya hubungan tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Ho = tidak adanya hubungan tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Untuk melihat dan menentukan ada tidaknya hipotesis yang digunakan dapat dicari dengan terlebih dahulu menentukan t hitung dan t tabel. Maka t hitung sudah didapatkan sebesar 5,0 dan untuk mengetahui t tabel dapat dicari dengan perbandingan signifikansi sebagai berikut :

Diketahui :

$$n = 78$$

$$a = 5\%$$

$$k = 2$$

Ditanya : t?

$$\begin{aligned} \text{Rumus} = t_{\text{Tabel}} &= (a : (df = n - k - 1)) \\ &= (5\% : 78 - 2) \\ &= (0,5 ; 76) \\ &= 0,00657 \end{aligned}$$

Dari hasil perolehan perhitungan data t hitung 5,0 dan t tabel 0,00657 terlihat t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $5,0 > 0,00657$, maka H_0 ditolak dan artinya adanya pengaruh yang signifikan dari tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Tingkat status sosial ekonomi dapat memenuhi pemahaman pemilih pemula dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan informasi politik, sehingga cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilu dan calon yang dipilih. Di sisi lain, pemilih dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi kendala aksesibilitas terhadap informasi pendidikan politik,

yang dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang pemilu.

Pemahaman tentang pemilu sangat penting bagi pemilih pemula dikarenakan langkah pertama bagi mereka dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sebagai generasi yang akan mewarnai masa depan negara, pemilih pemula perlu memahami bagaimana memilih pemimpin yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai mereka percayai. Dengan pemahaman yang baik terhadap pemilih pemula tentang pemilu, mereka dapat membantu dan melindungi diri dari manipulasi politik yang mungkin mereka hadapi sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi dengan bijak dan bertanggung jawab.

Pada saat melaksanakan pra penelitian 31 Mei 2024 di Desa Suka Mulia berdasarkan observasi dan wawancara di temukan pemilih pemula yang putus sekolah, mereka lebih memilih menikah dan bekerja di bandingkan lanjut bersekolah. Dari kurangnya pendidikan formal seseorang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem politik, proses pemilihan umum, atau pentingnya partisipasi dalam pemilu. Dari kurangnya pendidikan formal tingkat status sosial

status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 Di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat hal ini dikarenakan pada olah data dengan rumus korelasi pearson product moment dan dari rumus tersebut nilai korelasi (r) 0,46 dikategorikan pada korelasi sedang dilihat melalui perhitungan dari kedua variabel yaitu variabel X (status sosial ekonomi) dan variabel Y (pemahaman pemilu) menggunakan rumus korelasi pearson product moment. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai pengaruh tingkat status sosial ekonomi terhadap pemahaman pemilu pemilih pemula pada pilres 2024 di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat kepala Desa dan peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

Pihak kepala Desa akan mengadakan program sosialisasi pemilu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang sosial ekonomi pemilih pemula dengan mengadakan seperti penyuluhan, seminar, atau program pendidikan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesediaan waktu mereka.

Mendorong partisipasi dalam diskusi dan forum publik tentang isu-isu

politik dan pemilu, yang memungkinkan pemilih pemula untuk bertukar pandangan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam.

Referensi

- Abdullah, N. S. (1993). Pengantar Ilmu Ekonomi Forum Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Koperasi. Bandung : Program Pendidikan Koperasi FPIPS IKIP.
- Abdulsyani. (2002). Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abdulsyani. (2007). Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agung, A.M., & Lilik. (2007). Dari budaya perusahaan ke budaya kerja; dalam bukucorporate culture, challenge to excellence. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arianto, B. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 51-60.
- Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

- Pemula di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (PILGUB) Jabar 2013. *J. UNIKOM*. 1 (1).
- Nasution. (1994). *Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Neliwati. (2018). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif (kajian teori dan praktek)*. Widiya Puspita. Medan : UINSU.
- Ngadiyono. (1998). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alumni.
- Otariana, W. (2013). *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Banyumas Selama Menjadi Daerah Percontohan Otonom Tahun 2012*. Universitas Indonesia. Skripsi
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Megatama. Rajawali Jakarta.
- Purnama, R., & Dewi, M.TF. (2020) *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Langensari Kota Banjar Tahun 2018*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 6(2), 245-256.
- Ritonga, M.T. dkk. (2000). *Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Rudini. (1994). "Atas Nama Demokrasi". Jakarta: Bigraf Publishing.
- Sarbaini. (2015). *Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Inovatif*, Volume III Nomor 1. Hal. 107.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang :IKIP Semarang Press.
- Sekretaris Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas. (2010). *Modul : Pemilihan untuk Pemula*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.
- Sholikin, A. (2019). *Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019*. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87-108.
- Sholikin, A. (2021a). *Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 104-117.
- Sholikin, A. (2021b). *Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma*. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168-184.
- Solikhin, A. (2017). *Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai*

Sy, Pahmi. (2010). Politik Pencitraan.
Gaung Persada Press. Jakarta.

Tamam, G, Z. (2021). Pengaruh Tingkat
Status Sosial Ekonomi Terhadap
partisipasi Politik Masyarakat
Pada Pemilihan Umum Presiden
Tahun 2019 Di Kelurahan
Grendeng. Skripsi

Tamara, G. A. (2016). Pengaruh Sosial
Ekonomi Terhadap Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten
Lampung Tahun 2015 (Studi
Perbandingan Kelurahan Way
Urang dan Kelurahan Bumi
Agung Kecamatan Kalinda
Kabupaten Lampung Selatan).

Tatik Suryani. (2008). Perilaku
Konsumen. Yogyakarta : Graha
ilmu.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dalam
Bab IV Pasal 198.

Widiyanto, Joko. (2010). SPSS For
Windows Untuk Analisis Data
Statistik dan Penelitian.
Surakarta : BP-FKIP UMS.

Yossimeilinda. 2021. Prefersi Politik
Pemilihan Mileniar Dalam
Pilkada Kota Padang Tahun
2018. Skripsi